

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved June 13, 2022, from https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/5100/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1
- Christina Irwati Tanan, K. A. D. (2021). *Journals of Economics Development Issues (JEDI) Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum*. 4(1), 377–389.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). 濟無No Title No Title No Title. 53–63.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Hoffmann, 2009. (2009). Metode Penelitian. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9), 1689–1699. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. R. (n.d.). *Imam Gunawan*,. 3, 51–74.
- IMANIA WIGGA PRATIWI. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. *Skripsi*.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2022). 10 Provinsi dengan Jumlah Sepeda Motor Terbanyak. *Dkatadata*, 2022. <https://oto.detik.com/motor/d-5358321/10-provinsi-dengan-jumlah-sepeda-motor-terbanyak-nomor-1-bukan-jakarta>
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Kualitas Pelayanan Dengan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Nofriandi, R. (2017). *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/1/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa*. 9–44. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>
- Pemprov Bali Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor yang Menunggak Lebih dari 2 Tahun | *merdeka.com*. (n.d.). Retrieved June 13, 2022, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-bali-beri-diskon-pajak-kendaraan-bermotor-yang-menunggak-lebih-dari-2-tahun.html>
- Peraturan Gubernur Bali. (2021). *Pergub No. 21 tahun 2021 tentang Pembebasan*

Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah RI. (1999). *Undang-undang Nomer 18 Tahun 1999 Pasal 1, tentang Pebagian Pajak Daerah.*

Peraturan Pemerintah RI. (2009a). *Undang-Undang nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Peraturan Pemerintah RI. (2009b). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Peraturan Pemerintah RI. (2015). *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 67 (4), tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Sakarya, T. H. E., & Of, J. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 7(2), 44–68.

Sari, S. amelia. (2017). *No Title* והשקייה מים. אפורים במים גינות השקייה של השפעות. In מים (Vol. 549).

